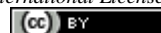


### **Financial Sustainability pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat**

Yuda Saputra<sup>1\*</sup>, Haryono<sup>2</sup>, Rusliyawati<sup>3</sup>, dan Juanda Astarani<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Tanjungpura, Indonesia

*Journal of Economics and Management Sciences is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.*



#### ARTICLE HISTORY

Received: 26 May 25

Final Revision: 02 June 25

Accepted: 04 June 25

Online Publication: 30 June 25

#### KEYWORDS

Financial Sustainability, Population, Financial Independence, Debt Level, Local Government

#### KATA KUNCI

Keberlanjutan Keuangan, Jumlah Penduduk, Kemandirian Keuangan, Tingkat Utang, Pemerintah Daerah

#### CORRESPONDING AUTHOR

yuddsaputra@gmail.com

#### DOI

10.37034/jems.v7i3.113

#### ABSTRACT

This study explores the key determinants of financial sustainability within the public sector, particularly at the local government level. The variables examined encompass demographic, economic, and financial aspects of local government. This study uses quantitative methods with panel data regression analysis tools with the support of SPSS 27. It uses purposive sampling techniques to obtain samples derived from the 2021-2023 data obtained from the *Badan Pemeriksa Keuangan* (BPK) and *Badan Pusat Statistik* (BPS) websites. Financial sustainability is evaluated using indicators derived from the adjusted operational reports. The research covers district and city governments in West Kalimantan Province during the fiscal years of 2021 to 2023. The results indicate that population and debt level negatively influence financial sustainability, whereas financial independence has a positive impact. The findings are expected to provide valuable policy insights for district and municipal governments in Indonesia, enabling them to promote financial sustainability in the long terms.

#### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji faktor utama keberlanjutan keuangan dalam sektor publik, khususnya pada tingkat pemerintah daerah. Variabel-variabel yang dianalisis mencakup aspek demografis, ekonomi, dan keuangan dari pemerintahan daerah. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan alat analisis regresi data panel yang didukung oleh perangkat lunak SPSS versi 27. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk memperoleh sampel berdasarkan data tahun 2021 hingga 2023 yang diperoleh dari situs resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS). *Financial sustainability* dievaluasi menggunakan indikator yang berasal dari laporan operasional yang telah disesuaikan. Penelitian ini mencakup seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat selama tahun anggaran 2021 hingga 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk dan tingkat utang berpengaruh negatif terhadap keberlanjutan keuangan, sementara kemandirian keuangan memberikan pengaruh positif. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan kebijakan yang bermanfaat bagi pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia dalam mendorong *financial sustainability* jangka panjang.

#### 1. Pendahuluan

Pemerintah kabupaten/kota sebagai entitas penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat daerah memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan publik yang efektif dan efisien. Dalam kerangka desentralisasi fiskal yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan yang luas dalam mengelola sumber daya dan keuangan daerahnya. Otonomi tersebut memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan fiskal dan pembangunan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan wilayah masing-masing. Namun demikian, kewenangan yang besar tersebut juga diiringi oleh tantangan yang kompleks dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam memastikan keberlanjutan keuangan atau *financial sustainability*.

*Financial sustainability* merupakan suatu kondisi dimana pemerintah daerah mampu memenuhi kewajiban keuangan dan pelayanan publik dalam jangka panjang tanpa menimbulkan risiko keuangan yang berlebihan. Konsep ini menekankan pentingnya stabilitas dan keberlanjutan anggaran daerah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan serta menjamin ketersediaan layanan publik bagi generasi kini dan yang akan datang. *Financial sustainability* adalah kapasitas entitas sektor publik untuk secara konsisten menjalankan program dan layanan dengan sumber daya keuangan yang tersedia, baik saat ini maupun di masa depan, tanpa mengakibatkan akumulasi utang yang tidak terkendali [1]. Oleh karena itu, studi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *financial sustainability* daerah menjadi sangat relevan dalam konteks pengelolaan keuangan yang modern dan berbasis kinerja.

Salah satu teori yang relevan dengan fenomena *financial sustainability* adalah neo-institusionalisme. Teori neo-institusionalisme berkembang sebagai respons terhadap kelemahan pendekatan institusional klasik yang terlalu menekankan pada struktur formal organisasi dan peraturan tanpa mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan politik yang membentuk perilaku organisasi. Neo-institusionalisme memandang bahwa organisasi tidak hanya bertindak rasional dalam mengejar efisiensi, tetapi juga terdorong untuk menyesuaikan diri dengan norma, nilai, dan harapan yang berlaku di lingkungannya untuk memperoleh legitimasi [2].

Lembaga sebagai sebuah entitas dapat dipengaruhi oleh berbagai elemen baik yang berasal dari dalam organisasi maupun dari luar. Pendekatan neo-institusionalisme menekankan bagaimana lingkungan sosial luar membentuk organisasi dengan menawarkan model-model struktur dan kebijakan baru yang ditujukan untuk meningkatkan legitimasi organisasi secara lebih luas. Proses ini tercermin dalam konsep konsep difusi dan isomorfisme [3]. Isomorfisme merujuk pada proses homogenisasi lembaga yang terjadi akibat adanya tekanan koersif dari aktor luar yang berada di luar organisasi. Dalam konteks pemerintah daerah, kewajiban untuk mengelola keuangan dengan baik kepada pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk mencapai kinerja optimal dalam pengelolaan keuangannya. Dalam praktiknya, pemerintah daerah sering kali meniru model pengelolaan keuangan dari daerah lain sebagai bentuk penerapan prinsip isomorfisme, sehingga menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Selain itu, pemerintah daerah juga berkewajiban untuk merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, termasuk *financial sustainability*, teori ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah dipengaruhi oleh tekanan institusional dari pemerintah pusat, lembaga pengawas, dan masyarakat untuk mengadopsi praktik-praktik pengelolaan keuangan yang sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku. Tiga jenis tekanan institusional adalah [2]:

- a) *Coercive isomorphism*, yaitu tekanan yang bersifat formal, seperti regulasi pemerintah pusat terkait pengelolaan keuangan dan pelaporan.
- b) *Mimetic isomorphism*, yaitu dorongan untuk meniru praktik yang dianggap sukses oleh daerah lain.
- c) *Normative isomorphism*, yaitu pengaruh dari profesionalisme, misalnya melalui standar akuntansi atau pelatihan aparatur sipil negara.

Teori neo-institusionalisme menyimpulkan bahwa lingkungan, sebagai konstruksi sosial akan mengarahkan perilaku organisasi dan anggotanya.

Jumlah penduduk di suatu daerah akan berdampak pada praktik yang dilakukan pemerintah daerah. Semakin meningkatnya jumlah penduduk, permasalahan sosial dan ekonomi juga semakin meningkat seperti meningkatnya tingkat kemiskinan [4]. Pada kondisi tersebut, pemerintah daerah mempunyai tekanan untuk mengeluarkan biaya dalam rangka menyediakan kebutuhan penduduk di daerahnya, sehingga akan berpengaruh terhadap *financial sustainability*. Ukuran populasi penduduk mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi *financial sustainability* melalui penerimaan atau penolakan atas kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah [5].

Pemerintah daerah akan selalu berusaha untuk memperbaiki kondisi keuangan menjadi lebih baik melalui peningkatan produktivitas dengan memanfaatkan sumber daya sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat di masing-masing daerah [6]. Kondisi keuangan yang baik adalah kondisi keuangan yang berkelanjutan atau stabil dan tidak menambah beban kepada masyarakat di periode selanjutnya. Ekuitas antar generasi (*intergenerational equity*) dianggap sebagai faktor penting dalam melakukan evaluasi keberlanjutan keuangan pemerintah untuk kelayakan keuangan di masa depan dalam rangka menyediakan pelayanan kepada publik [7].

Salah satu faktor yang diduga berpengaruh terhadap *financial sustainability* pemerintah daerah adalah jumlah penduduk. Dalam teori ekonomi publik, populasi yang besar dapat menjadi potensi sekaligus tantangan keuangan. Di satu sisi, jumlah penduduk yang tinggi dapat memperbesar basis pajak dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kontribusi ekonomi masyarakat. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk yang cepat juga dapat meningkatkan beban pengeluaran pemerintah, terutama dalam penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Oleh karena itu, dinamika jumlah penduduk perlu diperhitungkan dalam kerangka kebijakan fiskal daerah.

Faktor lain yang turut berkontribusi terhadap *financial sustainability* adalah tingkat kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan mencerminkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunannya secara mandiri, tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Indikator ini umumnya diukur melalui rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Daerah yang memiliki tingkat kemandirian keuangan yang tinggi cenderung lebih fleksibel dalam merespons dinamika ekonomi lokal, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan menghindari tekanan fiskal akibat ketidakpastian transfer dana dari pusat. Sebaliknya, ketergantungan yang tinggi terhadap dana perimbangan dapat menjadi

hambatan dalam menciptakan sistem keuangan daerah yang tangguh dan berkelanjutan.

Selain jumlah penduduk dan kemandirian keuangan, tingkat utang daerah juga menjadi variabel penting yang memengaruhi *financial sustainability*. Utang daerah, baik dalam bentuk pinjaman maupun kewajiban jangka panjang lainnya, merupakan instrumen pembiayaan yang sah menurut regulasi pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, serta PP Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, dijelaskan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman untuk membiayai kegiatan produktif yang menghasilkan penerimaan daerah atau meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun demikian, penggunaan utang yang tidak hati-hati dan tidak disertai dengan perencanaan fiskal yang matang dapat menimbulkan risiko fiskal di masa depan. Beban pembayaran bunga dan pokok pinjaman dapat membatasi ruang fiskal untuk belanja publik dan mengganggu kestabilan anggaran daerah.

Dalam konteks Provinsi Kalimantan Barat, studi mengenai *financial sustainability* pemerintah kabupaten/kota menjadi sangat penting, mengingat karakteristik wilayah yang beragam baik dari sisi geografis, demografis, maupun kapasitas fiskal. Kalimantan Barat terdiri dari 14 kabupaten/kota yang memiliki tingkat pembangunan, jumlah penduduk, dan struktur pendapatan daerah yang berbeda-beda. Beberapa daerah masih sangat bergantung pada dana transfer pusat, sementara daerah lain mulai menunjukkan peningkatan dalam perolehan PAD. Variasi ini membuka ruang bagi analisis empiris yang mendalam terkait faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan keuangan di tingkat lokal.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk, kemandirian keuangan, dan tingkat utang terhadap *financial sustainability* pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan daerah dan data statistik daerah dari Badan Pusat Statistik (BPS), penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan fiskal daerah yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Temuan dari studi ini juga diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi peningkatan kapasitas fiskal daerah serta dalam menyusun perencanaan keuangan jangka menengah dan panjang yang lebih baik.

Secara teoretis, penelitian ini didasarkan pada pendekatan ekonomi fiskal dan teori manajemen keuangan sektor publik, yang menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab, efisien, dan berorientasi pada hasil (*outcome-based budgeting*). Selain itu, kajian ini juga mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Dengan memahami

pengaruh faktor-faktor seperti jumlah penduduk, tingkat kemandirian keuangan, dan utang terhadap *financial sustainability*, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih bijak dalam menyusun kebijakan fiskal yang tidak hanya mengutamakan pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga *financial sustainability* dalam jangka panjang.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif berdasar pada pengolahan data sekunder yang berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021-2023 yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian ini menggunakan studi kausal dengan pengujian hipotesis yang bertujuan untuk menguji dan mengidentifikasi hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, dimana variabel independen mampu atau menyebabkan terjadinya variabel dependen [8]. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Barat. Sampel pada penelitian adalah seluruh populasi yang berjumlah 42.

Teknik pengambilan sampel penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Variabel pada penelitian ini terdiri atas satu variabel dependen dan tiga variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *financial sustainability* (FS) yang dihitung berdasarkan pendapatan yang telah disesuaikan, yaitu selisih antara pendapatan operasional dengan beban operasional yang telah dikurangkan dengan pos luar biasa [9]. Sumber data variabel dependen dari Laporan Operasional. Variabel independen yang pertama adalah jumlah penduduk (JP), yaitu semua orang yang berdomisili di wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan data BPS pada tahun 2021-2023. Variabel independen yang kedua adalah kemandirian keuangan (KK), yaitu rasio perbandingan antara pendapatan asli daerah dan total pendapatan operasional. Variabel independen yang ketiga adalah tingkat utang (TU), yaitu rasio total utang terhadap total pendapatan. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda data panel.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1 Analisis Deskriptif**

Analisis deskriptif merupakan tahap awal dalam melakukan analisis data, analisis ini bertujuan mengetahui karakteristik data seperti rata-rata, median, standar deviasi, nilai maksimal atau minimal suatu data, berikut ini tabel analisis deskriptif dari masing-masing variabel menggunakan SPSS 27. Hasil analisis deskriptif dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
FS	-78139,36	572907,86	87783,85	120563,278
JP	121472,00	676005,00	396059,83	180401,486
KK	0,01	5,20	1,42	1,534
TU	0,00	1,85	0,54	0,533

Pada Tabel 1 diketahui bahwa *financial sustainability* (FS) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat mempunyai nilai rata-rata 87.783,85. Nilai maksimum sebesar 572.907,86, nilai minimum sebesar -78.139,36 dengan standar deviasi sebesar 120.563,27. Variabel jumlah penduduk (JP) mempunyai nilai rata-rata sebesar 396.059,83, nilai maksimum sebesar 676.005, nilai minimum sebesar 121,472 dengan standar deviasi sebesar 180,40. Variabel kemandirian keuangan (KK) mempunyai nilai rata-rata sebesar 1,42. Nilai maksimum sebesar 5,20, nilai minimum sebesar 0,01, dengan standar deviasi sebesar 1,53. Variabel tingkat utang (TU) mempunyai nilai rata-rata sebesar 0,54. Nilai maksimum sebesar 1,85, nilai minimum sebesar 0,00, dengan standar deviasi sebesar 0,533.

### 3.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, peneliti melakukan pengujian terhadap gejala penyimpangan klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedasitas.

#### 3.2.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas berfungsi untuk menguji apakah data pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji distribusi data normal, maka dapat dilakukan dengan uji non-parametrik Kolmogorov-smirnov (K-S) menggunakan SPSS. Hasil tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

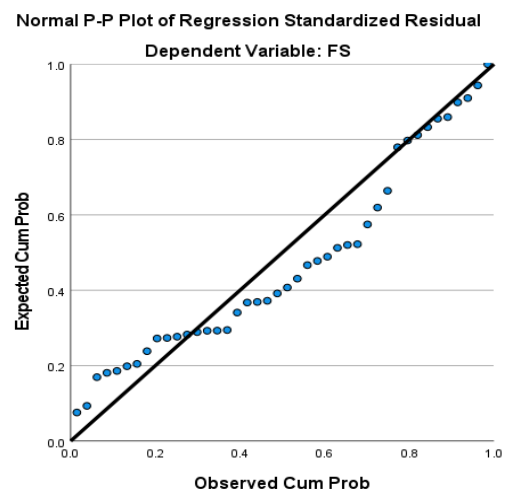
Tabel 2. Tes *One-Sample* Kolmogorov-Smirnov

		<i>Unstandardized Residual</i>	
N		42,00000000	
<i>Normal Parameters</i>		Mean	0,00000000
		Std. Deviation	102040,03044386
<i>Most Differences</i>	<i>Extreme</i>	<i>Absolute</i>	0,12700000
		<i>Positive</i>	0,12700000
		<i>Negative</i>	-0,12500000
<i>Test Statistic</i>		0,12700000	
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,08400000	

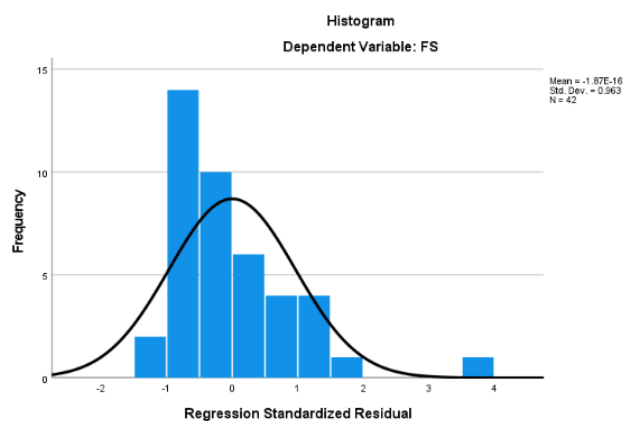
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari SPSS pada Tabel 2, dapat dilihat bahwa *Asymp. Sig (2 tailed)* memiliki nilai sebesar 0,084, yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi diatas 0,05 ( $0,084 > 0,05$ ). Hal ini berarti bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal. Gambar 1 adalah pengujian normalitas menggunakan metode p-plot. Berdasarkan informasi pada gambar tersebut, diketahui bahwa data yang digunakan menyebar di sekitar garis diagonal dan masih mengikuti garis diagonal. Hal tersebut mengindikasikan data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi secara normal, sehingga asumsi normalitas data terpenuhi. Berdasarkan grafik histogram

pada Gambar 2, dapat dilihat distribusi data yang mengikuti kurva bentuk lonceng yang tidak menceng. Dari hasil uji normalitas tersebut dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Gambar 1. *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual*



Gambar 2. *Histogram Regression Standardized Residual*



#### 3.2.2 Uji Multikolinieritas

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menentukan apakah terdapat korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak ada korelasi antara variabel-variabel independen [10]. Hasil uji multikolinieritas dapat ditentukan dengan nilai *Varian Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance value* dari setiap variabel independen. Jika ditemui nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai toleransi lebih besar dari 0,1 maka suatu model regresi dianggap bebas dari multikolinieritas. Berdasarkan Tabel 3, hasil uji dapat dilihat bahwa semua nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antar variabel bebas atau tidak terjadi multikolinieritas pada penelitian.

Tabel 3. *Collinearity Statistics*

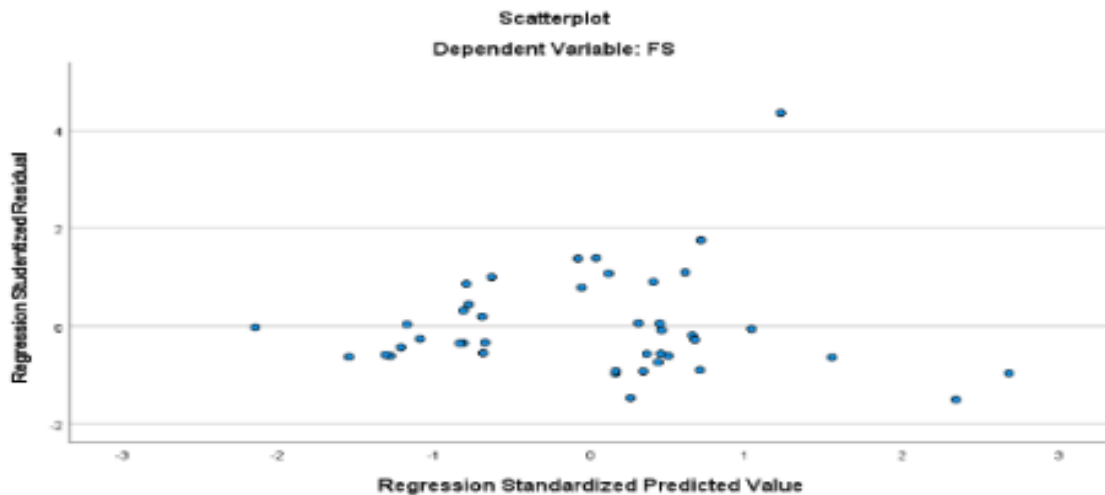
Variabel	Tolerance	VIF
JP	0,924	1,082
KK	0,152	6,582
TU	0,150	6,661

3.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi perbedaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik merupakan yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas [10]. Untuk melihat ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada penelitian ini dapat dilakukan dengan melihat grafik p-plot antara nilai terikat yaitu

ZPRED dengan residualnya SPRESID, yang terlihat pada Gambar 3. Jika terdapat pola yang teratur atau menumpuk pada titik-titik tertentu maka terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil Gambar 3, maka dapat dilihat bahwa pola yang berbentuk tidak menunjukkan adanya pola yang teratur, melainkan pola yang didapatkan dari hasil olahan tersebut terbentuk tidak jelas serta titik-titik tersebut menyebar di atas dan di bawah di sekitar angka nol, sehingga dapat disimpulkan bahwa heteroskedastisitas tidak terjadi.

Gambar 3. Diagram Sebaran



3.3 Analisis Regresi Linier Berganda dan Uji Hipotesis

Persamaan regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen dengan variabel dependen memiliki pengaruh, baik secara parsial maupun simultan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk (X1), kemandirian keuangan (X2), dan tingkat utang (X3). Sedangkan variabel dependen adalah *financial sustainability* (Y).

Table 4. Multiple Regression Analysis Result

	B	t	Sig.
(Constant)	145746,207	3,402	0,002
JP	-0,162	-2,040	0,048
KK	92468,022	3,388	0,002
TU	-233535,825	-2,957	0,005

Berdasarkan *output* yang dihasilkan oleh SPSS pada Tabel 4, diketahui bahwa nilai konstanta sebesar 145.746,207, nilai koefisien dari variabel JP (X1) sebesar -0,162, nilai koefisien variabel KK (X2) sebesar 92.468,022, nilai koefisien variabel TU (X3) sebesar -233.535,825, sehingga dapat diketahui persamaan regresi linier berganda pada Persamaan 1.

$$Y = 145.746,207 - 0,162 JP + 92.468,022 KK - 233.535,825 TU + e \quad (1)$$

3.3.1 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap *financial sustainability*

Jumlah penduduk merupakan salah satu variabel penting dalam menentukan kapasitas fiskal dan kebutuhan pelayanan publik suatu daerah. Dalam konteks pemerintah daerah, semakin besar jumlah penduduk, semakin tinggi pula tuntutan terhadap penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial. Hal ini menyebabkan beban pengeluaran daerah meningkat, yang jika tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan, dapat mengancam *financial sustainability*.

Tekanan fiskal yang berasal dari pertumbuhan penduduk cenderung menyebabkan ketidakseimbangan anggaran, terutama di negara berkembang atau wilayah yang belum memiliki sistem perpajakan yang kuat. Dengan demikian, kabupaten/kota yang memiliki populasi besar namun belum mandiri secara fiskal cenderung lebih rentan mengalami defisit dan ketidakberlanjutan fiskal [11].

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4, variabel jumlah penduduk mempunyai nilai signifikansi sebesar  $0,048 < 0,050$ . Hal ini berarti variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh secara negatif terhadap *financial sustainability* pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar jumlah penduduk suatu daerah,

maka semakin tinggi pula beban yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan layanan publik dan penanganan persoalan sosial yang kompleks. Semakin besar jumlah penduduk, maka kebutuhan akan fasilitas publik, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur meningkat secara signifikan, yang pada akhirnya dapat menekan kapasitas fiskal daerah dan menurunkan keberlanjutan keuangan jangka panjang.

Seiring bertambahnya jumlah penduduk, banyak fasilitas publik yang harus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melayani masyarakat, selain itu banyak masalah sosial lain yang bertambah juga, sehingga beban pemerintah daerah akan semakin meningkat [12], [13], [14]. Dengan demikian, ukuran populasi merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan pertumbuhan penduduk dalam proses penyusunan anggaran dan kebijakan fiskal agar alokasi sumber daya dapat lebih efektif dan efisien. Selain itu, pemahaman yang baik terhadap karakteristik demografis daerah akan membantu pemerintah dalam mengantisipasi perubahan kebutuhan pelayanan publik serta menjaga stabilitas fiskal dalam jangka panjang.

### 3.3.2 Pengaruh kemandirian keuangan terhadap *financial sustainability*.

Kemandirian keuangan daerah merupakan indikator penting dari kapasitas suatu daerah untuk membiayai kebutuhan belanja publik secara mandiri, tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat. Semakin tinggi kemandirian keuangan, semakin besar pula fleksibilitas fiskal daerah dalam menentukan prioritas pembangunan dan alokasi sumber daya. Kemandirian keuangan menunjukkan derajat desentralisasi keuangan yang sesungguhnya. Daerah yang memiliki tingkat kemandirian keuangan tinggi cenderung lebih tahan terhadap guncangan ekonomi dan kebijakan fiskal nasional yang berubah-ubah, karena memiliki kontrol lebih besar atas pendapatannya [15].

Dalam konteks *financial sustainability*, kemandirian keuangan yang tinggi memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya secara lebih strategis dan berkelanjutan. Selain itu, daerah yang mandiri keuangannya memiliki insentif yang lebih besar untuk mengoptimalkan PAD dan efisiensi pengeluaran. Sebaliknya, ketergantungan tinggi pada Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) menempatkan daerah pada posisi rentan, terutama ketika terjadi perubahan kebijakan fiskal nasional atau penurunan dana transfer.

Kemandirian keuangan juga merupakan kemampuan daerah dalam menunjukkan peningkatan pendapatan asli daerah [13]. Jika sebuah daerah mampu memberikan layanan publik dengan memanfaatkan sumber

pendapatan asli daerah, maka kestabilan keuangan daerah tersebut akan lebih terjamin. Hal ini karena daerah tidak hanya bergantung pada pinjaman atau bantuan dana dari pemerintah pusat, sehingga daerah tersebut memiliki kendali yang lebih besar atas kondisi keuangannya. Dengan demikian, daerah dapat mempertahankan keuangan yang sehat dan berkelanjutan dalam jangka waktu panjang.

Variabel kemandirian keuangan mempunyai nilai signifikansi sebesar  $0,042 < 0,050$ . Hal ini berarti variabel kemandirian keuangan memiliki pengaruh secara positif terhadap *financial sustainability* pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kemandirian daerah berpengaruh signifikan terhadap *financial sustainability* [16].

Kemandirian keuangan yang diukur melalui proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan menunjukkan sejauh mana daerah mampu mengelola keuangannya secara mandiri tanpa ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan, maka semakin kuat kapasitas daerah untuk merencanakan, mengelola, dan mengalokasikan anggaran berdasarkan kebutuhan lokal. Kondisi ini juga mendorong terjadinya inovasi dan inisiatif lokal dalam peningkatan penerimaan, investasi publik, dan efisiensi belanja daerah. Kemandirian keuangan ini juga mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan inisiatif ekonomi lokal, menarik investasi, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan kemandirian daerah tidak hanya memberikan manfaat dari segi keuangan, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan lokal yang berkelanjutan dan mandiri dalam jangka panjang.

### 3.3.3 Pengaruh tingkat utang terhadap *financial sustainability*

Tingkat utang daerah merupakan indikator penting dalam menilai *financial sustainability* suatu pemerintah daerah. Penggunaan utang publik diperbolehkan sepanjang digunakan secara produktif dan tidak menimbulkan beban fiskal yang berlebihan di masa depan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, ditegaskan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman untuk membiayai kegiatan yang menghasilkan pendapatan dan/atau penghematan belanja. Namun, jika utang digunakan untuk membiayai belanja konsumtif atau tidak menghasilkan *return* ekonomi, maka akan membebani keuangan daerah dan mengancam *financial sustainability*.

Rasio utang terhadap pendapatan daerah merupakan salah satu indikator yang sering digunakan dalam

menilai kesehatan fiskal jangka panjang. Peningkatan utang daerah tanpa peningkatan kemampuan pembayaran akan mengurangi ruang fiskal (*fiscal space*) dan mengurangi fleksibilitas anggaran dalam menghadapi kebutuhan mendesak. Selain itu, beban bunga utang dan kewajiban pelunasan pokok akan mengalihkan anggaran dari program-program pembangunan [17].

Beban hutang akan mengancam *intergenerational equity*. Hutang disusun sedemikian rupa sehingga setiap generasi menanggung hutang sepadan dengan peningkatan kualitas pelayanan, seperti rumah sakit dan perpustakaan yang dibiayai oleh hutang, hutang tersebut akan muncul di setiap generasi sehingga kemampuan daerah untuk menanggapi kebutuhan yang darurat akan dibatasi dengan kewajiban membayar hutang [18]. Pembiayaan yang berasal dari hutang membuat pemerintah daerah lebih berisiko mengalami tekanan keuangan [19]. Rasio utang terhadap total pendapatan (DTR) berpengaruh negatif terhadap *financial sustainability* pemerintah daerah di Indonesia [12].

Variabel tingkat utang memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,005 < 0,050$ , yang berarti variabel tingkat utang memiliki pengaruh secara negatif terhadap *financial sustainability* pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hal tersebut sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa ketika beban hutang pemerintah daerah semakin tinggi, maka pemerintah daerah tidak mampu untuk mendanai kebutuhan masyarakat karena dibatasi oleh kewajibannya melunasi hutang [18]. Namun penelitian berbeda menyatakan bahwa tingkat utang tidak berpengaruh terhadap *financial sustainability* dimana suatu pemerintah atau organisasi mungkin memiliki rasio utang yang tinggi, namun apabila pendapatan yang dihasilkan dari investasi atau operasional secara konsisten mampu menutupi pembayaran utang, maka *financial sustainability* tetap dapat terjaga [16].

### 3.4 Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen dalam suatu penelitian. Pada tabel 5, *Adjusted R-square* menunjukkan nilai 0,249 atau sama dengan 24,9%. Nilai tersebut mempunyai arti bahwa *financial sustainability* dipengaruhi oleh jumlah penduduk, kemandirian keuangan dan tingkat hutang sebesar 24,9%, sedangkan sisanya 75,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 5. Hasil R Square

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,551a	0,304	0,249

## 4. Kesimpulan

Jumlah penduduk, kemandirian dan tingkat utang berpengaruh signifikan terhadap *financial sustainability*

pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Jumlah penduduk memiliki pengaruh secara negatif, kemandirian keuangan memiliki pengaruh secara positif, sedangkan tingkat utang memiliki pengaruh secara negatif terhadap *financial sustainability* pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel-variabel lain yang dapat memengaruhi *financial sustainability*, seperti kualitas tata kelola, tingkat transparansi fiskal, inovasi kebijakan fiskal, dan partisipasi publik dalam perencanaan anggaran. Pendekatan ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor penentu *financial sustainability* pemerintah daerah. Selain itu keterbatasan penelitian ini adalah rentang waktu pengamatan yaitu hanya 2021-2023 dan bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah rentang waktu penelitian sehingga bisa memberikan gambaran yang lebih luas terkait fenomena *financial sustainability* di sektor pemerintah.

## Daftar Rujukan

- [1] IFAC (International Federation of Accountants). (2014). *Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements*. New York: IFAC.
- [2] DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American sociological review*, 48(2), 147-160. <https://doi.org/10.1515/9780691229270-005>
- [3] Powell, W. W., & Bromley, P. (2015). New institutionalism in the analysis of complex organizations. *International encyclopedia of the social & behavioral sciences*, 16, 764-769. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08097086-8.32181-X>
- [4] Riahi, O., & Khoufi, W. (2019). Understanding IFRS adoption: Consideration of the institutional dimension through a behavioral context. *Journal of Applied Accounting Research*, 20(4), 543–570. <https://doi.org/10.1108/JAAR02-2017-0034>
- [5] Subires, M. D. L., Muñoz, L. A., Galera, A. N., & Bolívar, M. P. R. (2019). The influence of socio-demographic factors on financial sustainability of public services: A comparative analysis in regional governments and local governments. *Sustainability*, 11(21), 1-18. <https://doi.org/10.3390/su11216008>
- [6] Andrews, R. (2015). Vertical consolidation and financial sustainability: evidence from English local government. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 33(6), 1518–1545. <https://doi.org/10.1177/0263774X15614179>
- [7] Rodríguez Bolívar, M. P., Navarro Galera, A., Alcaide Muñoz, L., & López Subirés, M. D. (2014). Factors influencing local government financial sustainability: An empirical study. *Lex Localis*, 12(1), 31–54. <https://doi.org/10.4335/12.1.3154>
- [8] Sekaran, U., dan Bougie, R. (2022). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian (6 ed.)*. Jakarta: Salemba Empat.
- [9] Rodríguez Bolívar, M. P., Navarro Galera, A., López Subirés, M. D., & Alcaide Muñoz, L. (2018). Analysing the accounting measurement of financial sustainability in local governments through political factors. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 31(8), 2135–2164. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-102016-2754>
- [10] Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Universitas Diponegoro.

- [11] Mahdavi, S., & Westerlund, J. (2011). Fiscal stringency, fiscal sustainability, and the size of government. *Applied Economics*, 43(4), 471–487. <https://doi.org/10.1080/00036840802570446>
- [12] Wardhani, D. T., dan Payamta, P. (2020). Menguji Faktor Determinan Financial Sustainability pada Sektor Pemerintah. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(1), 13-27. <http://dx.doi.org/10.33603/ka.vdi1.3305>.
- [13] Ritonga, I. T., Clark, C., & Wickremasinghe, G. (2019). Factors Affecting Financial Condition of Local Government in Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 20(2), 1–25. <https://doi.org/10.18196/jai.2002114>
- [14] Rodríguez Bolívar, M. P., Navarro Galera, A., Alcaide Muñoz, L., & López Subirés, M. D. (2016). Risk Factors and Drivers of Financial Sustainability in Local Government: An Empirical Study. *Local Government Studies*, 42(1), 29–51. <https://doi.org/10.1080/03003930.2015.1061506>
- [15] Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Salemba Empat.
- [16] Sebastian, M. R., Oktarida, A., dan Aprianti, S. (2023). Financial Sustainability in South Sumatra Province. *Proceeding of Accounting, Management, Business and Sustainability*, 1, 123-132.
- [17] Bisogno, M., Cuadrado-Ballesteros, B., Santis, S., & Citro, F. (2019). Budgetary solvency of Italian local governments: an assessment. *International Journal of Public Sector Management*, 32(2), 122–141. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-112017-0328>
- [18] Faulk, D., & Killian, L. (2017). Special Districts and Local Government Debt: An Analysis of “Old Northwest Territory” States. *Public Budgeting and Finance*, 37(1), 112–134. <https://doi.org/10.1111/pbaf.12122>
- [19] Trussel, J. M., & Patrick, P. A. (2009). A predictive model of fiscal distress in local governments. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 21(4), 578–616. <https://doi.org/10.1108/jpbafm-21-042009-b004>